

KEBERLANJUTAN PROGRAM PESAWAT TEMPUR KFX/IFX DALAM INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

25

Aulia Fitri

Abstrak

Disetujuinya pembahasan RUU Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI merupakan babak baru bagi keberlanjutan program joint development pesawat tempur KFX/IFX. Sebelumnya keberlanjutan program joint development pesawat tempur ini sempat menjadi perdebatan di kalangan publik, mengingat adanya berbagai kendala yang mengakibatkan terjadinya penundaan dalam program yang disepakati sejak tahun 2010 ini. Bagi Indonesia, program joint development KFX/IFX ini merupakan proyek penguasaan teknologi pesawat tempur perdana yang diarahkan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelanjutan program joint development pesawat tempur KFX/IFX dalam mendorong peningkatan kapabilitas industri pertahanan Indonesia dilihat dari aspek-aspek dalam life-cycle of weapon system. Dalam upaya mendorong peningkatan kapabilitas menuju kemandirian industri pertahanan nasional, DPR RI perlu memaksimalkan peranannya dalam mengawal kelanjutan pelaksanaan Program KFX/IFX ini.

Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 11 Juli 2018 mengesahkan RUU Kerjasama Bidang Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan (liputan6.com, 2018). Salah satu perjanjian dalam kerjasama tersebut di antaranya di bidang industri pertahanan yakni program *joint development* pesawat tempur KFX/IFX. Program ini telah berlangsung sejak 2010, namun dalam perkembangannya ada berbagai

kendala yang mengakibatkan terjadinya penundaan program ini. Mulai dari permasalahan lisensi teknologi, pendanaan, hingga permintaan negosiasi ulang dari pihak Indonesia. Berbagai permasalahan tersebut juga dikritisi Oleh Komisi I dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan RI pada 10 Juli 2018 lalu, yang meminta agar program ini jangan sampai menyalahi hubungan kedua negara dan kaidah undang-undang



yang disepakati, juga sebagai *early warning* agar pemerintah senantiasa mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Program *joint development* KFX/IFX ini merupakan salah satu program nasional untuk membangun kemandirian industri pertahanan yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tulisan ini mengkaji mengenai kelanjutan Program KFX/IFX dalam mendorong peningkatan kapabilitas industri pertahanan Indonesia yang ditinjau dari aspek-aspek dalam *life-cycle of weapon system*.

Permasalahan Program KFX/IFX

Awal mula kerjasama *joint development* pesawat tempur *Korean Fighter Xperiment/KFX* (versi Korea Selatan) dan *Indonesia Fighter Xperiment/IFX* (versi Indonesia) dimulai tahun 2010 ketika Korea Selatan menawarkan program kerja sama pengembangan pesawat tempur kepada Indonesia. Ide awal munculnya proyek KFX/IFX berasal dari keinginan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman Korea Utara, dengan mengembangkan pesawat tempur dengan kemampuan *stealth* (terhindar dari deteksi radar). Di pihak Indonesia, tujuan utama dalam *joint development* ini adalah untuk membangun kemandirian industri pertahanan dengan peningkatan kapabilitas penguasaan teknologi pertahanan (janes.com, 2018).

Berdasarkan Permenhan RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X, pelaksanaan kerja sama *joint development* pesawat tempur KFX/IFX terdiri dari tiga tahap, yaitu: **Tahap pertama** (*Technology Development Phase/TDP*)

dilaksanakan pada 2010 hingga 2012; **Tahap kedua**, *Engineering and Manufacture Development Phase/EMDP* (2015-2023) merupakan tahapan inti pembangunan *prototype* pesawat; **Tahap ketiga**, *Production Phase/PP* (2025-2026) akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Teknologi pesawat KFX/IFX ini akan mengadopsi pesawat generasi 4.5 atau lebih unggul dari pesawat F-16 dengan desain *single seat, twin engine*, yang memiliki kemampuan *stealth* di atas *Eurofighter Typhoon* dan *Dassault's Rafale*.

Saat ini seharusnya tahapan pembangunan KFX/IFX berada pada tahap kedua atau EMDP. Di tahap kedua ini, muncul berbagai masalah yang berimbas pada tertundanya kembali pelaksanaan program pengembangan pesawat tempur ini. Salah satu permasalahan utama dalam program ini adalah lisensi teknologi dari Amerika Serikat (AS). Dalam program ini, Korea Selatan menggandeng *Korean Aerospace Industry (KAI)* yang juga bermitra dengan *Lockheed Martin, AS*. Beberapa teknologi seperti *radar, engine, dan avionics* yang diterapkan pada KFX/IFX adalah produk *Lockheed Martin* hasil perjanjian *offset* dengan Korea Selatan atas pembelian pesawat F-35 *Joint Strike Fighter* (liputan6.com, 2017). Namun, terdapat 4 *core technologies* yang tidak mendapat persetujuan *Technical Assistance Agreement (TAA)* dari AS. Keempat *core technologies* itu di antaranya *AESA Radar, Infrared Search and Track (IRST), Electronic Optics Targeting Pod (EOTGP), dan Radio Frequency Jammers*. Sebagai syarat, AS meminta Indonesia membentuk *Defense Technology Security System (DTSS)*, sebuah

sistem pengamanan teknologi untuk mewujudkan komitmen bahwa *sharing knowledge* keempat *core technologies* tersebut tidak akan dibocorkan pada pihak manapun (The Jakarta Post, 2018).

Permasalahan keterlambatan pihak Indonesia dalam memenuhi kewajiban tahunan pembiayaan program KFX/IFX sebesar US\$124,5 juta di tahun 2017 telah menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan program tersebut. Pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada 19 Oktober 2017, diketahui bahwa Kementerian Pertahanan tidak menganggarkan dana pembayaran kewajiban tahunan tersebut pada APBN 2016 dan 2017. Padahal, melalui perjanjian *cost sharing and work assignment agreement* yang disepakati pada tahun 2016, pihak Indonesia setuju untuk membayar 1% biaya program setiap tahunnya, dengan kontribusinya naik di atas 2% mulai tahun 2017 dan seterusnya (sindonews.com, 2017).

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait permintaan negosiasi ulang dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Menurut Kementerian Pertahanan, MoU antara kedua negara belum menguntungkan pihak Indonesia, terlebih ada intervensi AS yang membatasi lisensi teknologi dalam program pembuatan pesawat tempur (janes.com, 2018).

Program KFX/IFX dan Industri Pertahanan Indonesia

Saat ini, progres pengembangan pesawat tempur KFX/IFX terhenti di tahap kedua yaitu EMDP. Apabila program ini akan dilanjutkan, maka menjadi penting untuk mempertimbangkan aspek-

aspek *life cycle of weapon system* dalam kelanjutan pembangunan pesawat tempur tersebut. *Life cycle of weapon system* adalah keseluruhan fase dalam akuisisi pertahanan yang meliputi: Fase penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi; Fase produksi; Fase penyebaran; Fase operasi dan dukungan; dan fase pembuangan/*disposal*. Dalam *life cycle of weapon system*, terdapat empat aspek yang berpengaruh pada proses akuisisi pertahanan di antaranya: Iklim politik/*political climate*; Keadaan ekonomi/*state of the economy*; Organisasi akuisisi/*organization for acquisition*; Ketersediaan teknologi/*technology availability* (Johnson, 2005: 82). Keempat aspek inilah yang dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan Program KFX/IFX.

Pada aspek iklim politik, dukungan kebijakan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan telah membuka jalan bagi kelanjutan program ini yang akan memfasilitasi komite bersama dalam menjalankan kaidah kontrak termasuk mengatasi perselisihan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Peningkatan komitmen dengan Korea Selatan yang merupakan partner pengembangan teknologi pertahanan Indonesia juga penting dilakukan untuk kelanjutan program *joint development* KFX/IFX. Selain itu, faktor pengaruh AS juga perlu dipertimbangkan, misalnya dengan melakukan peningkatan kerja sama bidang pertahanan dengan AS.

Aspek krusial lainnya dalam proses akuisisi pertahanan adalah keadaan ekonomi. Berkaca pada kejadian di tahun 2017 perihal keterlambatan pembayaran kewajiban tahunan karena belum dianggarkan di APBN, maka penting dilakukan

evaluasi terkait koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Kemajuan industri pertahanan akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, seluruh pemangku kepentingan perlu secara sinergis mewujudkan kebangkitan industri pertahanan.

Aspek Organisasi Akuisisi adalah fungsi organisasional untuk memastikan keberlangsungan penggunaan persenjataan dalam jangka panjang dengan memperhitungkan segi misi, pemeliharaan, suku cadang, serta peningkatan keterampilan. Dalam rencana pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, fasilitas hanggar untuk pembangunan prototipe dan produksi pesawat sudah dibangun di lingkungan PT DI sejak tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2016 Indonesia telah mengirim 300 orang tenaga ahli PT DI ke Korea Selatan untuk mempelajari teknologi program pengembangan KFX/IFX selama empat tahun (merdeka.com, 2017). Investasi yang sudah dilaksanakan dari segi infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM yang secara spesifik ditujukan untuk pembangunan KFX/IFX akan menjadi sia-sia apabila keberlanjutan dari program ini masih tertunda.

Dalam proses akuisisi pertahanan, ketersediaan teknologi merupakan persyaratan utama. Namun, dalam program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, lisensi teknologi merupakan permasalahan utama. Hingga saat ini pihak AS belum memberikan persetujuan atas 4 *core technologies* untuk pembangunan pesawat tempur KFX/IFX. Adapun permintaan pihak AS terhadap

Indonesia untuk membangun DTSS masih terkendala payung hukum untuk mengatur mekanisme pengadaannya. Di lain pihak, Korea Selatan sudah memiliki *Directorate General Defense Security* yang sudah berjalan untuk menjaga sistem keamanan teknologi (janes.com, 2018). Indonesia harus dapat mengimbangi gap penguasaan teknologi dengan belajar untuk mengimplementasikan sistem tersebut kepada Korea Selatan. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan AS. Pada awal tahun 2018, AS menawarkan kerja sama pengembangan teknologi alutsista dan kemitraan angkatan bersenjata (okezone.com, 2018). Hal tersebut perlu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun kepercayaan dengan AS.

Berdasarkan tinjauan di atas, keempat aspek dalam *life cycle of weapon system* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan *program joint development* KFX/IFX. Dalam membangun kapabilitas pertahanan yang diinginkan, Indonesia telah menetapkan sasaran pokok jangka panjang yaitu membangun kemandirian nasional di bidang teknologi pertahanan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Bagi Indonesia, program *joint development* KFX/IFX ini merupakan proyek pembuatan pesawat tempur pertama yang didasari oleh keinginan membangun penguasaan teknologi pesawat tempur. Namun faktanya, program ini dihadapkan pada tantangan yang berakibat pada masa depan kelanjutannya. Perkembangan terakhir, DPR RI telah menyetujui RUU Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan untuk memberikan

pengawasan dan dukungan yang lebih besar untuk program kolaboratif industri pertahanan kedua negara.

Penutup

Peluang keberlanjutan Program KFX/IFX semakin terbuka setelah disahkannya RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Korea Selatan. Tidak dapat dipungkiri, program *joint development* KFX/IFX ini berdampak pada penguasaan teknologi pesawat tempur bagi Industri pertahanan nasional. Terkait keberlanjutan program ini, aspek-aspek *life cycle of weapon system* dapat menjadi pertimbangan, khususnya dalam tujuan peningkatan kapabilitas industri pertahanan Indonesia.

Dalam aspek politik, penguatan komitmen dengan Korea Selatan dan peningkatan kerja sama bidang pertahanan dengan AS penting untuk membangun kepercayaan terkait akses *core technologies*. Pada aspek ekonomi, perlu ditingkatkan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait pendanaan. Dari aspek organisasi akuisisi, perlu dipertimbangkan juga investasi pengadaan infrastruktur dan peningkatan kemampuan SDM untuk pembangunan KFX/IFX ini agar tidak menjadi pemborosan yang sia-sia. Terakhir, dari aspek ketersediaan teknologi, penting bagi Indonesia untuk mengimbangi gap penguasaan kapabilitas teknologi dengan Korea Selatan khususnya dalam pengembangan DTSS. Selain itu, Indonesia juga perlu memanfaatkan tawaran kerja sama pertahanan AS untuk membangun kepercayaan dengan negara yang menyediakan sumber teknologi inti pengembangan pesawat tempur KFX/IFX tersebut.

Sebagai proyek pembangunan pesawat tempur perdana, program ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi serta dukungan dari pemerintah dalam keberlanjutan program ini. DPR RI melalui fungsi pengawasan juga perlu memaksimalkan peranannya, terutama agar implementasi program ini sesuai dengan undang-undang dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara.

Referensi

- Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan, 2015.
- "DPR Sepakati RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea", <https://www.liputan6.com/news/read/3583628/dpr-sepakati-ruu-kerjasama-pertahanan-indonesia-dan-korea>, diakses 10 Juli 2018.
- "Indonesia Belum Bayar Iuran, Korsel Tunda Proyek Pesawat Tempur KF-X", <https://international.sindonews.com/read/1254188/40/indonesia-belum-bayar-iuran-korsel-tunda-proyek-pesawat-tempur-kf-x-1509693844>, diakses 13 Juli 2018.
- "Indonesia Enacts Law to Boost Collaboration with South Korea", <http://www.janes.com/article/81721/indonesia-enacts-law-to-boost-collaboration-with-south-korea>, diakses 13 Juli 2018.
- "Indonesia Wants to Renegotiate KFX Fighter Project", <http://www.janes.com/article/79727/indonesia-wants-to-renegotiate-kfx-fighter-project>, diakses 13 Juli 2018.

Johnson, A. W. (2005). *Acquisition*, dalam C.M. Brandt, *The Fundamental of Military Logistics: A Prime of The Logistics Infrastructure*. Ohio: Defence Institute of Security Assistance Management.

“Kunjungi Indonesia, Menhan AS akan Bahas Modernisasi Alutsista”. <https://news.okezone.com/read/2018/01/19/18/1847477/kunjungi-indonesia-menhan-as-akan-bahas-modernisasi-alutsista>, diakses 15 Juli 2018.

“Pembuatan Jet Tempur RI-Korsel Terganjil Lisensi dari AS”, <https://www.liputan6.com/global/read/2848157/pembuatan-jet-tempur-ri-korsel-terganjal-lisensi-dari-as>, diakses 15 Juli 2018.

“Should Indonesia Continue KFX/IFX Program?”, *The Jakarta Post*, 4 Juli 2018, hal 7.

“Ternyata ini Sebabnya Jet Tempur IFX Terus Terkatung-katung”, <https://www.merdeka.com/dunia/ternyata-ini-sebabnya-jet-tempur-ifx-terus-terkatung-katung.html>, diakses 15 Juli 2018.



Aulia Fitri
aulia.fitri@dpr.go.id

Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han), menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 dan pendidikan S2 Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.